Notulen

Agenda : Konferensi Pers Capaian Sumbar 2023 dan Outlook APBD Sumbar 2024
Tempat : Ruang Rapat Istana Gubernur
Waktu : Selasa, 02 Januari 2024
Pimpinan : Gubernur Sumbar
Peserta : 1. Bappeda Sumbar
2.
3. Diskominfotik Sumbar
4. Wartawan media cetak, elektronik dan media online (12 media)

Pembahasan :

Capaian 2023

1. Rapat dimulai pukul 14.00 W.I.B dipimpin oleh Gubernur Sumatera Barat. Gubernur memaparkan capaian penerimaan daerah sebesar Rp. 6.501.737.002.947,- (96,1% dari target) pendapatan didominasi oleh pendapatan transfer (52,26%);
2. Capaian realisasi belanja sebesar Rp. 6.304.117.162.187,- (93,18% dari target), didominasi belanja pegawai (34,94%);
3. Silva tidak sesuai rencana. Ditergetkan Rp. 350 juta tercapai Rp. 251 juta;
4. Gubernur menyampaikan capaiak makro pembangunan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

CAPAIAN MAKRO PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	Tahun 2022		Tahun 2023		Target Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi (tw 3)	RPJMD	RKPD
1	Indek Pembangunan Manusia	72,74	73,26 No.9 Tertinggi Nasional	73,23	75,64 No. 7 Tertinggi Nasional	73,62	74,25*
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,40	4,36	4,57	4,79 (TW I : 4,83; TW II : 5,16; TW III : 4,30)	4,60	4,76 KUA PPAS : 4,8-5,7
3	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	32,00	32,37	32,97	Belum ada data	34,24	34,85
4	PDRB (ADHB) per kapita (Rp. Juta)	48,29	50,59	50,60	Belum ada data	53,69	59,88
5	Indeks Gini (Ratio)	0,298	0,292 No. 4 Tertinggi Nasional	0,296	0,280 (Maret) No. 3 Tertinggi Nasional	0,293	0,290*
6	Tingkat Kemiskinan (%)	6,28	6,04 No.6 Tertinggi nasional	6,16	5,90 (Maret) No.6 Tertinggi nasional	6,03	5,62
7	Penduduk Miskin (ribu jiwa)	356,45	343,82	353,68	340,37 (Maret)	350,62	324,71
8	Kemiskinan Ekstrem	0,80	0,77	0,50	0,41 No.6 Tertinggi nasional	0	0
9	Tingkat pengangguran terbuka (%)	6,60	6,17	6,45	5,94	6,31	5,70

* Karena realisasi 2023 melebih target 2024, maka akan dilakukan revisi (meningkatkan) target 2024

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5. Capaian nilai tukar petani meningkat 109,60; Pendapatan petani hutan meningkat 17,24% menjadi Rp. 2.319.511,-;
6. Inflasi 3,14, sediikit di atas inflasi nasional sebesar 2,86;
7. Program Sumbarpreneur diikuti oelh 108.947 peserta;
8. Pertambahan nigari sebanyak 107 Nagari dan peningkatan status Nagari Mandiri meningkat dari 132 nagari menjadi 226 nagari; dan Nagari Maju meningkat dari 458 menjadi 486;

9. Pelayanan Publik berhasil mendapat predikat A dengan nilai 91,71 (peringkat 6 dari 38 Prov.);
10. Investasi PMA pada tahun 2023 meningkat dari 95.654.000 USD menjadi 67.092.000 USD; Investasi PMDN meningkat dari Rp. 2.559.750.700,- menjadi Rp. 3.411.563.200.000,-;
11. Pada tahun 2023 Pemprov Sumbar memperoleh 39 penghargaan dari berbagai K/L di tingkat pusat.

Outlook 2024

1. Penurunan kemiskinan ekstreem dilakukan melalui penurunan beban pengeluaran masyarakat (9 OPD dan 25 Sub Kegiatan); meningkatkan pendapatan daerah (9 OPD dan 25 program); dan meminimalkan wilayah kantong keminskinan (12 OPD dan 19 Sub Kegiatan).
2. Adapun prioritas pembangunan pada pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
    a. Dilakukan peningkatan SDM melalui dua pendekatan utama, yaitu pendidikan dan kesehatan;
    b. Peningkatan nilai tambah dan produksi pertanian dilakukan melalui hilirisasi. Pemprov menargetkan PDRB dari sector pertanian sebesar Rp. 44 T;
    c. Peningkatan usaha perdagangan dan UMKM berbasis digital, didorong 3 OPD yaitu Disperindag, Dinas Koperasi UMKM dan DPMPTSP;
    d. Ekonomi dan Pariwisata didorong oleh Dinas Pariwisata dan Dinas Koperasi dan UMKM;
    e. Pembangunan infrastruktur berkeadilan, didorong oleh Dinas BMCKTR, Perkimtan, Perhubungan, PSDA, BPBD dan Dinas LH;
    f. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik menargetkan indeks RB 70,50; Nilai SAKIP 18,50 dan Opini laporan keuangan WTP;
    g. Diharapkan anggaran yang disiapkan dalam program peningkatan produksi pertanian dapat menstimulus dana dari luar masuk ke Sumatera Barat.

Diskusi :

1. Fauzi dari Harian Haluan: Apakah target pajak daerah telah tercapai? Bagaimana alokasi pendapatan dari dana transfer?
2. Nofi dari Majalah Intrust: Penas Tani manelan biaya Rp. 100 M. Aset Penas Tani tidak jelas kepemilikannya dan bagaimana kontribusi terhadap Pemda atas kepemilikan asset tersebut?
3. Sumatera Barat dipandang sering membuat kegiatan "rame-rame" yang tidak berdampak pada masyarakat, bagaimana menurut Bapak?
4. Bagaimana persiapan Pemprov Sumbar menghadapi PON 2024? Apakah benar hubungan Gubernur dan KONI tidak harmonis?
5. Mohon pertimbangan Gubernur terkait besaran kerjasama media.
6. Kenapa Pemprov Sumbar tidak memfasilitasi Dana hibah PWI pada tahun 2024?
7. Investasi pariwisata dirasa kurang signifikan, bagaimana pandangan Gubernur?
8. Kelangkaan dan distribusi pupuk menjadi keluhan petani.
9. Devi dari Khazanah: Penyebab silva di tahun 2023, apakah ada kegiatan yang tidak terlaksana?
10. Anggaran BPBD dirasa terlalu minim di banding resiko bencana yang ada di Sumbar, apa pertimbangan penetapan anggaran ini?

11. Fitri dari Klik Positif: Apa upaya strategis yang dilakukan untuk mencapai PDRB di sector pertanian?
12. Arfan dari Posmetro: Alokasi anggaran BMCKTR Rp. 251 M, dua infrastruktur terbengkalai, Gedung budaya dan Main Stadium (termasuk Progul), dan infrastruk Tol bagaimana tindak lanjutnya?
13. Tindak lanjut Groundbreaking jalan layang Sitinjau Lauik
14. Faiz dari Koran Padang: Bagaimana sinkronisasi kelanjutan pembangunan infrastruktur dengan anggaran mandatory?
15. Yose : Bagaimana variabel yang dianggap sebagai entrepreneur dalam program 100.000 milenial entrepreneur?

Tanggapan Gubernur:

1. Dana DAU sudah direktif dan sudah ditentukan peruntukannya hingga ke tingkat Sub Kegiatan. Distribusi dana transfer pada tahun 2023 dihitung berdasarkan kebutuhan ditambah 10%, sisanya disimpan di Bank Indonesia dengan bunga untuk pemerintah pusat. Hal ini menjadi salah satu penyebab berkurangnya pendapata daerah (diperkirakan berjumlah lebih dari Rp. 100 M)
2. Target pendapatan tidak tercapai berasal dari pajak rokok. Pendapatan pajak selain dari rokok mencapai target.
3. Pemerintah masih terus melakukan komunikasi dengan calon investor, Kadin dan pemerintah pusat. Pemprov menunjuk tim khusus untuk berkomunikasi dengan Arab Saudi sebagai salah satu calon investor.
4. Pemprov akan memaksimalkan pemanfaatan asset melalui kerjasama dengan pihak ketiga (investor).
5. Pemprov juga telah membuat MoU dengan seluruh provinsi tetangga untuk mendukung akses investasi dan pembangunan.
6. Target investasi 2024 meningkat 9,5%
7. Persiapan Penas Tani sejumlah Rp. 100 M dihitung sejak persiapan pada tahun 2019. Aset yang dibangun dalam rangka mendukung Penas Tani dirasakan oleh masyarakat. Asset yang berada dalam Kawasan Lanud Sutan Syahrir sementara dimanfaatkan AURI. Kedepan asset direncanakan dimanfatkan untuk optimalisasi Pacuan Kuda di Sumatera Barat (asset dekat dengan lokasi Pacuan Kuda).
8. Angak Rp. 100 M dihimpun dari seluruh pembangunan daerah yang berhubungan baik langsung dan tidak langsung terhadap pelaksanaan Penas Tani. Hal ini dilkaukan untuk menunnjukan keseriusan Pemprov Sumbar terhadap pelaksanaan Penas Tani pada Pemerintah Pusat;
9. Sektor pariwisata memberikan kontribusi pendapatan secara langsung pada daerah. Sumatera Barat memilik potensi pariwisata, oleh karena itu Pemprov Sumbar memprioritaskan peningkatan kunjungan pariwisata. Target 2023 8,2 juta, November 2023 telah tercapai 9 juta kunjungan. Untuk mendorong peningkatan kunjungan Pemprov Sumbar membenahi objek wisata dan infrastruktur pendukung pariwisata.
10. Dana persiapan PON telah disiapkan oleh Pemprov Sumbar kurang lebih Rp, 15 M. Dukungan Pemprov terhadap KONI tetap dilaksanakan sesuai aturan.
11. Keluhan petani terhadap pupuk terjadi karena distribusi pupuk tidak sesuai waktu yang diharapkan. Beberapa daerah dapat terpenuhi kebutuhan pupuk subsidi. Sebagai alternative Pemprov Sumbar mendorong masyarakat memanfaatkan pupuk organic;

12. Silpa telah diproyeksikan sebelumnya. Pada tahun berjalan beberapa peraturan baru menyebabkan target silpa tidak tercapai. Silpa bersumber dari sisa tender, sisa gaji dan belanja tidak terduga yang tidak terpakai;
13. Penanganan bencana bukan hanya tugas BPBD, melainkan hanya mengkoordinasikan saja. Anggaran kebencanaan juga terdapat pada OPD lain seperti BMCKTR, Sosial, SDABK, dll. Di samping itu tersedia dana darurat mendesak yang dapat dimanfaatkan untuk kebencanaan di BPKAD;
14. Target Rp. 44 T dicapai melalui program hilirisasi yang akan menstimulus sumber dana dari luar (investasi, CSR, bantuan permodalan dari Bank, dll); dana yang disiapkan oleh Pemprov bersifat sebagai magnet bagi masuknya dana luar Sumbar; Salah satunya dilakukan dengan pembangunan akses dan infrastruktur pendukung dan memberikan kemudahan perizinan dan investasi. Contoh: pembangunan akses jalan Lunang Silaut;
15. Salah satu contoh upaya hilirasi dilakukan melaui Pengembangan BLUD TTIC dan BUMD Agro dan kerjsama dengan perguruan tinggi;
16. Gedung Budaya akan diprioritaskan section B sesuai dengan harapan dari budayawan; Tidak ada penolakan terhadap rencana hotel;
17. Main Stadium saat ini sedang dalam proses mencari pendanaan (salah satunya dengan megupayakan mengundang pelaksanaan event olahraga di Main Stadium), kebutuhan Rp. 600 M. APBD tidak sanggup mendanai;
18. Groundbreaking Sitinjau Lauik tetap akan dilaksanakan. Jalur Sitinjau Lauik telah menjadi prioritas karena jalur yang ada sekarang ini membahayakan pengguna jalan (data KNKT). Progres saat ini memasuki tahap beauty contest.
19. Jalan Tol diprediksi selesai sebelum Lebaran 2024. Saat ini progress pembangunan lancar. Diharapkan dapat menjawab permasalahan akses transportasi Padang-Sicincin;
20. Akses Solok-Pessel diproyeksikan selesai tahun 2024;
21. DAU ditentukan menyebabkan celah fiscal lebih sempit.

Tanggapan Ka. Bappeda

22. Hibah PWI telah sampai pada pembahasan KUA PPAS. Setelah telaah dilakukan Bersama DPRD. Rincian pamanfaatan dan hibah hanya dapat dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan (rincian dana hibah PWI yang diajukan termasuk operasional kantor);
23. Flyover Sitinjau Lauik dalam proses tender KPBU; proposal sudah disusun dan ditenderkan (tender investor); KNKT merekomendasi agar flyover segera dibangun;
24. Definisi operasional dari program entrepreneur pelatihan kewirausahaan dan fasilitasi izin usaha dan permodalan. Tahapan selanjutnya terhadap peserta yang telah mengikuti program yaitu survey peningkatan pendapatan peserta program entrepreneur; Khususs entrepreneur petani hutan telah dilakukan survey dan mengalami peningkatan pendapatan sebesar 17%.

Tanggapan Ka. Biro Adpim

25. Kerjsama media terhukum kondisi anggaran.

Tanggapan Ka. Diskominfo

26. Administrasi pembayaran media order seringkali harus direvisi karena berbagai faktor, baik disebabkan oleh kekeliruan Diskominfotik maupun dari pihak media.

Penutup:

1. Kebutuhan data pendukung dapat diminta melalui Diskominfotik Sumbar;
2. Hasil koferensi pers dipublikasi pada media masing-masing undangan.

Mengetahui, Kepala Bidang IKP,	Notulen,
Indra Sukma, S.Kom	Algamar Arif Safitra
NIP. 19690303 199803 1 003	NIP. 19920624 202012 1 010